

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN GIG
ECONOMY DI KOTA PADANG***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program S1 Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



OLEH :

MUHAMMAD TAUFIK RIYADI

(19042074)

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : *Collaborative Governance* dalam Pengembangan *Gig Economy* di Kota Padang
Nama : Muhammad Taufik Riyadi
TM/NIM : 2019/19042074
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
NIP. 19640208 199003 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, 13 Agustus 2025 Pukul 17:00 s/d 18.00 WIB

*Collaborative Governance dalam Pengembangan Gig Economy di Kota
Padang*

Nama : Muhammad Taufik Riyadi
TM/NIM : 2019/19042074
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

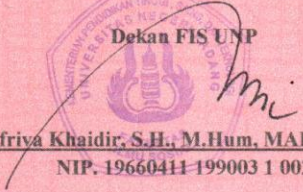
Padang, 13 Agustus 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Fitri Eriyanti M.Pd., Ph.D	1. 
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP, MA	2. 
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	3. 

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411-199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Muhammad Taufik Riyadi

NIM : 19042074

Tempat/Tanggal Lahir : Padang/24 Oktober 2001

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul ***“Collaborative Governance dalam Pengembangan Gig Economy di Kota Padang”***. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Agustus 2025



Muhammad Taufik Riyadi
19042074

ABSTRAK

**Muhammad Taufik Riyadi : *Collaborative Governance* dalam
Pengembangan *Gig Economy* di Kota
Padang**

Penelitian ini menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan *gig economy* di Kota Padang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN), Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOP & UMKM), serta para *gig worker*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah dimulai melalui peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan akselerator, terlihat dari program pelatihan kerja, bimbingan usaha, dukungan pemasaran digital, dan fasilitasi akses pemodalan. Namun, keterlibatan aktor non-pemerintah seperti akademisi dan LSM dalam perumusan kebijakan masih terbatas, dan struktur kolaborasi formal jangka panjang perlu dikembangkan. Faktor pendukung utama meliputi inisiatif pemerintah, fleksibilitas kerja yang menarik bagi pekerja, serta pemanfaatan teknologi dan jaringan digital. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketidakpastian regulasi dan kebijakan platform yang merugikan pekerja, minimnya perlindungan hukum dan sosial, kendala operasional dan ekonomi bagi *gig worker*, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat pinggiran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor, perumusan regulasi

yang lebih komprehensif, dan peningkatan literasi digital sangat krusial untuk menciptakan ekosistem *gig economy* yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Padang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Gig Economy, Kota Padang, Perlindungan Pekerja, UMKM Digital.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi dengan judul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN GIG ECONOMY DI KOTA PADANG”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Padang.

1. Bapak Ir Krismardinata ST.,MT.,P.h.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir SH., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Dra Fitri Eriyanti M.Pd.,Ph.D Selaku kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membantu , mengarahkan , motivasi meluangkan waktu , tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
4. Bapak Dr. Zikri Alhadi,S.Ip, M.A selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan perbaikan dan masukkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini
5. Bapak Rahmadani Yusran S.Sos.,M.Si Dosen Penguji II yang telah membantu penulis dalam pemberian perbaikan , masukkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

6. Bapak / Ibuk Dosen dan Staff Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Ibuk Leni Marlina, ST, MM selaku Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, sebagai informan yang telah memberikan izin, turut terlibat, serta memberikan pendapat, saran, dan kemudahan dalam penelitian ini.
8. Ibuk Meliani Fitri, SE selaku Pengantar Kerja Ahli Muda di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, sebagai informan yang telah memberikan izin, turut terlibat, serta memberikan pendapat, saran, dan kemudahan dalam penelitian ini.
9. Ibuk Frisna Devi, SKM, MM selaku Jabatan Fungsional bagian Pengembang Kewirausahaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Padang, sebagai informan yang telah memberikan izin, turut terlibat, serta memberikan pendapat, saran, dan kemudahan dalam penelitian ini.
10. Asrizal, Reza Oskario, Cipto Putra, sebagai informan yang telah memberikan izin, turut terlibat, serta memberikan pendapat, saran, dan kemudahan dalam penelitian ini.
11. Arya dan Fajar, sebagai informan yang telah memberikan izin, turut terlibat, serta memberikan pendapat, saran, dan kemudahan dalam penelitian ini.
12. Irvan Wariski, Ahmad Taufik Marzuq, Muhammad Farhan Armanda, Ovianti Suci Ramadhani, Farah Azizah, Sanju Yedo Oksa, dan Mutia Abidah, sebagai informan yang telah memberikan izin, turut terlibat, serta memberikan pendapat, saran, dan kemudahan dalam penelitian

ini.

13. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, yakni Papa Aminuddin dan Mama Maryeni tersayang yang sangat penulis banggakan dan sayangi, atas dukungannya dan doa tulusnya yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis, sehingga penulis sampai ke jenjang Sarjana.
14. Teruntuk keluarga besar tercinta, mulai dari Oma, Opa, Mama, Tante, Bunda, Ayah, Oom, dan Papa Kakak dan Adek yang selalu memberikan semangat, masukan dan juga motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan dari awal kuliah hingga akhir yaitu dari seluruh grup diskusi yang saya ikuti, tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana dengan penulis serta saling bantu membantu, berbagi ilmu selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial ini, dalam penyelesaian skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan yang membangun sebagai bentuk evaluasi pembelajaran selanjutnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Padang, 15 Agustus 2025



Muhammad Taufik Riyadi
NIM. 19042074

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	I
ABSTRAK	II
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	7
A. Kajian Teoritis	7
1. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	7
2. Karakteristik <i>Collaborative Governance</i>	8
3. Konsep <i>Gig Economy</i>	12
4. Tipologi <i>Gig Economy</i>	14
5. Faktor Pendukung Pengembangan <i>Gig Economy</i>	15
6. Faktor Penghambat Pengembangan <i>Gig Economy</i>	16
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Kerangka Konseptual	25
BAB III	26
METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik dan Alat Pengumpulan data	28
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	32
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Temuan Umum	32
B. Temuan Khusus	35
C. Pembahasan	54
BAB V	65
KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan.....	27
-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan permasalahan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunnya kualitas hidup masyarakat, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia per Agustus 2024 sebesar 4,91%. Sementara itu, TPT di Kota Padang mencapai 9,88% pada November 2024, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa Kota Padang menghadapi tantangan serius dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya.

Menurut Didi Aryadi, Asisten II PJ Wali Kota Padang (Padek, 4 Desember 2024), salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Kota Padang adalah banyaknya lulusan perguruan tinggi yang memilih menetap setelah menyelesaikan pendidikan. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja, terutama di sektor formal. Dalam konteks ini, diperlukan peran aktif pemerintah untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif yang mampu menyerap tenaga kerja, salah satunya melalui *gig economy*.

Gig economy merupakan sistem kerja berbasis permintaan (*on-demand*), di mana individu menawarkan jasa atau keterampilan melalui platform digital untuk

proyek jangka pendek tanpa hubungan kerja formal (Stefano, 2016).

Pekerja dalam ekosistem ini, yang dikenal sebagai *gig worker*, biasanya bekerja sebagai *freelancer*, kontrak, atau paruh waktu, dan mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, atau *platform* layanan daring lainnya.

Di tengah terbatasnya lapangan kerja formal, *gig economy* menjadi solusi alternatif bagi banyak individu untuk tetap produktif secara ekonomi. Namun, keberhasilan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada dukungan regulasi, pelatihan, dan infrastruktur digital yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting sebagai fasilitator, regulator, sekaligus akselerator.

Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang responsif terhadap perubahan struktur ketenagakerjaan, memberikan perlindungan sosial bagi pekerja *gig*, serta memastikan akses yang merata terhadap teknologi dan pelatihan digital.

Jika dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, pengembangan *gig economy* di Kota Padang masih tergolong awal dan belum terstruktur dengan baik. Sebagai perbandingan, Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan digital melalui program *Broadband Learning Center* (BLC) yang tersebar di setiap kelurahan, bekerja sama dengan platform *e-commerce* seperti Lazada dalam memberikan pelatihan UMKM digital, serta menyelenggarakan event seperti Surabaya Startup Festival untuk mendukung inkubasi dan promosi startup berbasis teknologi

(Antaranews.com, 12 Juli 2024).

Demikian pula, Kota Bandung aktif membangun ekosistem digital dan ekonomi kreatif melalui inisiatif seperti Bandung *High Tech Valley* dan Bandung *Techno Park*, yang menjadi pusat riset dan pengembangan startup. Pemerintah Kota Bandung juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyediakan pelatihan keterampilan digital untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Bahkan, riset CSIS (2019) mencatat kontribusi *gig worker* di Bandung mencapai Rp10,1 triliun terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Bandung juga telah menerbitkan regulasi yang mengatur aktivitas ojek online melalui Peraturan Wali Kota dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yang memberi kejelasan hukum bagi *gig worker* di sektor transportasi daring (Kompas.com, 6 Agustus 2020).

Berbeda dengan Surabaya dan Bandung yang memiliki kebijakan digital terintegrasi dan dukungan infrastruktur yang kuat, pengembangan *gig economy* di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah belum meratanya infrastruktur internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum adanya kebijakan spesifik yang secara komprehensif mendukung pekerja digital. Padahal, potensi SDM di Kota Padang sangat besar, ditunjukkan oleh jumlah lulusan dari 60 perguruan tinggi, 48 SMA, dan 38 SMK setiap tahunnya, sebagaimana dicatat oleh Bappeda Kota Padang. Tanpa dukungan regulasi dan kebijakan strategis dari pemerintah daerah, potensi ini berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah Kota Padang sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, yang mengakui keberadaan pekerja berbasis aplikasi seperti ojek online. Selain itu, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi juga mulai dilakukan. Namun, langkah-langkah tersebut masih perlu diperkuat dan diperluas agar mampu menjawab tantangan dinamis yang dihadapi sektor kerja digital masa kini.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri digital, dan lembaga pendidikan menjadi aspek penting yang harus ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan *gig economy* yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu mendorong pengembangan keterampilan digital, ketersediaan data dan informasi mengenai *gig economy*, dan merancang kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja *gig* seperti jaminan sosial dan kepastian upah.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Collaborative Governance dalam Pengembangan Gig Economy di Kota Padang”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja *gig*.
2. Kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja *gig*.
3. Kurnagnya pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi pekerja *gig*.
4. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi mengenai *gig*

economy.

5. Kesenjangan akses literasi digital dalam masyarakat terutama didaerah pinggiran Kota Padang.
6. Keterbatasan dana dalam penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, dan inkubasi

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan *gig economy* di Kota Padang.
2. Untuk Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan *gig economy* di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan *gig economy* di Kota Padang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan *gig economy* di Kota Padang?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan terkait mata kuliah Ekonomi Pembangunan di Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan pemerintah Kota Padang dalam *collaborative governance* dalam pengembangan *gig economy*.
- 2) Bagi *Gig Worker*, penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi para *gig worker* dalam mendapatkan hak dan kewajiban.
- 3) Bagi Peneliti, bagi peneliti memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan *gig economy* di Kota Padang telah dimulai, namun perlu penguatan keterlibatan aktor *non*-pemerintah dan struktur formal yang lebih komprehensif. Pemerintah Kota Padang, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN) serta Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOP & UMKM), telah menunjukkan peran aktif sebagai fasilitator dan akselerator dalam mendukung *gig economy*. Ini terlihat dari program pelatihan kerja yang relevan, bimbingan dan konsultasi bagi pekerja, upaya perlindungan pekerja (meskipun masih terbatas), koordinasi lintas sektor, pemanfaatan *platform digital*, pembinaan dan pendampingan UMKM berbasis *gig*, program inkubasi kewirausahaan, dukungan pemasaran *digital*, serta kolaborasi akses pemodal dengan lembaga keuangan. Inisiatif ini mencerminkan karakteristik *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Namun, keterlibatan aktor lain seperti akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program masih belum terlihat secara eksplisit dan terstruktur. Proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis konsensus dengan semua pemangku kepentingan, dan kerangka kerja kolaborasi yang formal dan jangka panjang perlu lebih dikembangkan untuk mengatasi

isu-isu kompleks seperti perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi pekerja *gig*.

2. Pengembangan *gig economy* di Kota Padang didukung oleh inisiatif pemerintah dan karakteristik pekerja yang adaptif, Namun Terhambat oleh ketidakpastian regulasi, kendala operasional pekerja, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi digital. Faktor pendukung utama pengembangan *gig economy* di Kota Padang meliputi inisiatif dan program pemerintah daerah yang proaktif dalam pelatihan dan pembinaan, serta karakteristik pekerja *gig* yang adaptif terhadap fleksibilitas waktu dan otonomi kerja. Pemanfaatan teknologi dan jaringan digital juga menjadi pendorong signifikan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang penting, yaitu ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan hukum serta sosial bagi pekerja *gig* akibat status "mitra" yang rentan. Kendala operasional seperti ketergantungan pada *algoritma platform* yang tidak transparan dan kurangnya representasi serikat pekerja juga menjadi tantangan. Selain itu, keterbatasan pemerintah daerah dalam pemerataan infrastruktur internet dan rendahnya literasi *digital* masyarakat, terutama di daerah pinggiran, masih menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan *gig economy* yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait dalam

pengembangan gig economy di Kota Padang.

1. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN) Kota Padang, disarankan untuk memperkuat program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar *gig economy*, seperti *digital marketing*, *content creation*, *desain grafis*, serta pengelolaan layanan berbasis *platform digital*. Pelatihan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren permintaan pasar. Selain itu, DISNAKERIN diharapkan dapat meningkatkan kemitraan dengan perusahaan platform dan sektor swasta untuk membuka akses rekrutmen dan program magang bagi *gig worker*, serta mengembangkan sistem *monitoring* dan basis data pekerja *gig* agar pemerintah memiliki informasi akurat terkait jumlah, jenis pekerjaan, dan kebutuhan mereka.
2. Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (DISKOP & UMKM) Kota Padang, disarankan untuk menyediakan program inkubasi bisnis yang secara khusus mendukung *gig-based entrepreneurship*. Program ini sebaiknya mencakup pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan promosi digital. DISKOP & UMKM juga diharapkan mendorong kolaborasi antara *gig worker* dan UMKM lokal agar produk dan layanan dapat dipasarkan lebih luas melalui platform digital. Tidak hanya itu, fasilitasi literasi keuangan dan manajemen usaha juga penting diberikan kepada *gig worker* yang ingin mengembangkan kegiatannya menjadi usaha formal atau semi-formal.
3. Kepada para *gig worker* di Kota Padang, disarankan untuk senantiasa

meningkatkan kompetensi *digital* dan keterampilan khusus yang relevan dengan layanan yang mereka tawarkan, sehingga mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Mereka juga perlu membangun jejaring profesional dengan sesama pekerja *gig* dan komunitas untuk saling berbagi informasi, peluang kerja, dan dukungan. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai mitra *platform*, termasuk perlindungan data, perjanjian kerja sama, dan kebijakan tarif, menjadi hal penting untuk menghindari risiko yang dapat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 18, no. 4, 2008, pp. 543-571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Antaranews.com. "Pemkot Surabaya optimalkan BLC untuk promosi pelaku UMKM di era digital." *AntaranewsJatim.com* [Surabaya], 12 Juli 2022, <https://jatim.antaranews.com/berita/618269/pemkot-surabaya-optimalkan-blc-untuk-promosi-pelaku-umkm-di-era-digital>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)*. Padang, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 11 November 2024, <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM5IzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--menurut-kabupaten-kota>.
- Beritabar.co. "Gig Economy di Indonesia: Antara Fleksibilitas dan Kerentanan." *Beritabar.co* [Jakarta], 24 September 2024, <https://beritabar.co/gig-economy-di-indonesia-antara-fleksibilitas-dan-kerentanan> Accessed 28 Maret 2025.
- Bryson, John M., et al. "The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature." *Public Administration Review*, vol. 66, no. 51, 2006, pp. 44-55.
- Emerson, Kirk, et al. "An Integrative Framework for Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access published*, vol. 22, no. 1, 2011, pp. 1-29, <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Friedman, Gerrald. "Workers Without Employers: Shadow Corporations and The Rise of The Gig Economy." *Review of Keynesian Economics*, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 171-188. <https://www.elgaronline.com/>.
- Heeks, Richard. *Digital Economy and Digital Labour Terminology: Making Sense of the "Gig Economy", "Online Labour", "Crowd Work", "Microwork", "Platform Labour", Etc.* 70 ed., Manchester, Global Development Institute,

- SEED, University of Manchester, 2017, <https://www.gdi.manchester.ac.uk/research/publications/di/>.
- Hsieh, Jane, et al. "Designing Individualized Policy and Technology Interventions to Improve Gig Work Conditions." *Association for Computing Machinery*, no. 12, pp. 1-9, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3596671.3598576>.
- Ikhtiariza, Dyah, et al. "Perlindungan Hak Pekerja Lepas Dalam Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 9-15, <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/375>.
- Indra, and Sefti Afi Nawangsari. "Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia." *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 937-954, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2289/1729>.
- Izza, Sevilla Ruhul, et al. "Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional." *Journal of Regional Economics and Development*, vol. 1, no. 3, 2024, pp. 1-20, <https://economics.pubmedia.id/index.php/jred>.
- Kalleberg, Arne L. "Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition." *AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW*, vol. 74, 2009, pp. 1-22. <https://www.asanet.org/>.
- Keban, Yeremias T., et al. *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. Yogyakarta, IGPA Press, 2021. <http://igpa.map.ugm.ac.id>.
- Kompas.com. "Gig Worker Bandung Mampu Berkontribusi Ekonomi Rp 10,1 Triliun." Kompas.com [Bandung], 6 Agustus 2020, Gig Worker Bandung Mampu Berkontribusi Ekonomi Rp 10,1 Triliun.
- Koutsimpogiorgos, Nikos, et al. "Conceptualizing the Gig Economy and Its Regulatory Problems." *Policy & Internet*, 2020, pp. 1-21, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/poi3.237>.

- Kumparan. "Menakar Dampak dan Tantangan Gig Society dalam Ekonomi Digital di Indonesia." Kumparan.com [Ende], 26 Juni 2024, <https://kumparan.com/henajo66/menakar-dampak-dan-tantangan-gig-society-dalam-ekonomi-digital-di-indonesia-230kA4urKYB>.
- Latri, Akhdan Adityo, et al. "Hak Pekerja Di Era Gig Economy : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas dan Kontrak." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 374-383. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.
- Li, Shumeng. "The Gig Economy and Labour Market Dynamics." EWA Publishing, vol. 61, no. 1, 2023, pp. 275-281, <https://www.ewadirect.com/proceedings/aemps/article/view/8640>.
- Masakazu, Kadek, et al. "Peran Digital Freelancer Marketplace dan Media Sosial Terhadap Perkembangan Gig Economy Worker." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 214-225, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/61469>.
- McGuire, Michael. "Collaborative Public Management: Assessing What We Know and How We Know It." *Public Administration Review*, vol. 66, no. s1, 2006, pp. 33-43, <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00664>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2 ed., California, SAGE Publications, 1994.
- Muhyiddin, et al. "The Ambiguity of Employment Relationship in Indonesia's Gig Economy: A Study of Online Motorcycle Taxi Drivers." *Jurnal Ketenagakerjaan*, vol. 19, no. 3, 2024, pp. 263-280. <https://journals.kemnaker.go.id/>.
- Natalia, Christiayu, and FX Gugus Febri Putranto. "Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker di Indonesia Pascapandemi." *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 173-186, <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/479>.
- Nugroho, Joko, et al. "Economic GIG In Indonesia: Challenges And Opportunities For Gen Z And Milenials." *Best Journal of Administration and*

Management, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 27-34.
<https://internationalpublisher.id/>.

O'Leary, Rosemary. *The Collaborative Public Manager: New Ideas for the Twenty-First Century*. Edited by Rosemary O'Leary and Lisa Blomgren Bingham, Washington, D.C., Georgetown University Press, 2009. Accessed 22 July 2025.

Ostoj, Izabela. "The Logic of Gig Economy (Origins and Growth Prospects)." *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, vol. 66, no. 79, 2021, pp. 452-462.

Padek. "Pengangguran Terbuka Kota Padang Capai 48.067 Orang." *Padang Ekspres Digital Media* [Padang], 4 Desember 2024, <https://padek.jawapos.com/padang/2365383460/pengangguran-terbuka-kota-padang-capai-48067-orang>. Accessed 28 Maret 2025.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan. Diakses tanggal 20 April 2025 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175589/perda-kota-padang-no-2-tahun-2021>.

Permana, Muhammad Yorga, et al. "Measuring The Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution." *Jurnal Manajemen Teknologi*, vol. 21, no. 3, 2022, pp. 339-358, <https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek/article/view/50000>.

RadarBanjarmasin. "Menilik Peluang dan Tantangan Gig Economy di Kalsel." *radarbanjarmasin.jawapos.com* [Banjarmasin], 2 Oktober 2024, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/opini/1975152256/menilik-peluang-dan-tantangan-gig-economy-di-kalsel>.

Ramadani, Ananda Risma, et al. "Dampak Gig Economy Terhadap Stabilitas Pendapatan dan Kesejahteraan Pekerja "Studi Kasus Pada Pekerja Freelance."" *Jurnal Spektrum Ekonomi*, vol. 7, no. 12, 2024, pp. 457-462, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jse/article/view/7230>.

Scott, Walter. *Ivanhoe*. Edited by TRYLERS Media, New Jersey, Princeton University, 1984. Accessed 28 Maret 2025.

Sitorus, Aurelia Ananda, and Yenny Kornitasari. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Pekerja Gig di Indonesia." *Journal of Development Economic and Social Studies*, vol. 3, no. 2, 2024, pp. 537-551, <https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/308>.

Srnicek, Nick. *Platform Capitalism*. Polity Press, 2016. <https://www.politybooks.com/>.

Standing, Guy. *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Publishing, 2011. Accessed 28 Maret 2025.

Stefano, Valerio De. "The Rise of The "Just-in-Time Workforce": on-Demand Work, Crowd Work And Labour Protection in The "Gig-Economy."" *Comparative Labor Law & Policy Journal*, no. 26827602, 2016, pp. 1-51. <https://papers.ssrn.com/>.

Stevania, Maudy, and Siti Hajati Hoesin. "Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 11, no. 2, 2024, pp. 268-277, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/11968/6004>.

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif Metode penelitian kuantitatif, kualitatif ,dan RD*. Bandung, PT Alfabeta, 2014. <http://www.cvalfabeta.com/>.

sumbar.antaranews.com. "Ini modal Kota Padang kembangkan ekonomi kreatif." *sumbar.antaranews.com* [Padang], 28 Oktober 2019, <https://sumbar.antaranews.com/berita/302431/ini-modal-kota-padang-kembangkan-ekonomi-kreatif>.

Sundararajan, Arun. *The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*. MIT Press, 2016.

Wood, Alex J., et al. "Good Gig, Bad Gig: Autonomy and Algorithmic Control in the Global Gig Economy." *Work, Employment and Society*, vol. 33, no. 1,

2019, pp. 56-75,
<https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0950017018785616>.

Woodcock, Jamie, and Mark Graham. *The Gig Economy: A Critical Introduction*.
Cambridge, Polity Press, 2020. <https://politybooks.com>.